

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki banyak keutamaan, dari sisi hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan sesama manusia.¹ Seseorang yang mewakafkan harta benda memperoleh pahala yang terus mengalir kepadanya sekalipun ia telah meninggal dunia.² Di samping itu wakaf sangat membantu dalam kehidupan sosial, seperti dapat memberikan kemudahan untuk memperoleh pendidikan, kemudahan untuk memperoleh pengobatan dan seterusnya.

Wakaf uang adalah instrumen ekonomi Islam yang unik karena ia dapat diwujudkan dalam bentuk investasi di bidang keagamaan, ekonomi, serta kegiatan sosial lainnya. Selain itu ia sangat potensial, dengan kemudahan berwakaf uang serta tidak batasan dalam nominal besarnya lalu umat muslim di dunia yang sangat banyak khususnya di Indonesia. Hal ini merupakan aset besar dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian dapat menciptakan investasi-investasi yang dapat memberikan kesejahteraan umat.

Pada tahun 2002 wakaf uang memperoleh legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan penerbitan fatwa tentang dibolehkannya

¹ Saroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik* (Yogyakarta: Liberty, 1984), 9.

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), 27.

wakaf uang.³ Kemudian pada tahun 2004 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mana peraturan tersebut selain mengatur wakaf secara umum juga mengatur wakaf uang. Selain itu terdapat peraturan turunannya yang menguraikan pelaksanaan wakaf uang. Adanya dibentuk peraturan tersebut supaya wakaf uang dapat dikelola dengan baik. Kemudian pengelolaan berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan dari wakaf uang bisa tercapai.⁴

Peraturan tersebut di atas mengatur pengelolaan wakaf uang yang meliputi penghimpunan, pengembangan, dan pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang. Telah diatur bahwa dalam penghimpunan wakaf uang harus melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama.⁵ Lalu *wākif* yang berwakaf uang berhak memperoleh sertifikat wakaf uang sebagai tanda bukti.⁶ Dalam pengembangan wakaf uang disebutkan bahwa pengembangan dilakukan melalui dua macam investasi, yakni investasi pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau investasi proyek yang dijalankan oleh *nādzir*.⁷ Selain itu supaya investasi tersebut wakaf uang dapat terjaga keutuhannya, diharuskan untuk mengansuransikan pada asuransi syariah atau dengan mengikuti program lembaga penjamin

³ Tim Penyusun, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, 2003), 85.

⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵ *Ibid.*, pasal 28.

⁶ *Ibid.*, Pasal 29.

⁷ Pasal 10 ayat (1) Peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

simpanan.⁸ Selanjutnya dalam pendistribusian hasil pengembangan wakaf uang diperuntukkan bagi *mauqūf alaih* yang ditunjuk oleh *wākif*, dalam hal ini yaitu fakir miskin, yatim piatu, kegiatan ibadah, pendidikan, dan seterusnya.⁹

Selain ketiga macam tersebut telah diatur bahwa *nādzir* yang menerima wakaf uang harus mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama setempat.¹⁰ Hal ini dilakukan supaya dalam pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh *nādzir* ada sistem kontrol dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Namun belakangan ini banyak pengelola wakaf uang yang tidak menjalankan peraturan-peraturan tersebut, seperti *nādzir* tidak bekerja sama dengan LKS-PWU, tidak disediakan sertifikat wakaf uang bagi *wākif*, pengembangan wakaf uang yang tidak diasuransikan dan lain sebagainya. Salah satu contoh yaitu Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa yang merupakan pengelola wakaf uang.¹¹ Diungkapkan bahwa yayasan tersebut bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional.¹² Selain itu ia mengembangkan wakaf uang melalui investasi pembelian saham

⁸ Pasal 48 ayat (4) dan (5) PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Thn. 2004 Tentang Wakaf.

⁹ pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.

¹¹ Ayu Novita Pramesti, "Peran *Nādzir* Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2011).

¹² *Ibid.*, 58.

konvensional di PT GRHA 165.¹³ Hal tersebut bertolak belakang dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Banyaknya pengelola wakaf uang yang tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh karena kurangnya kesadaran hukum pengelola wakaf. padahal hukum dibuat untuk memenuhi tujuan-tujuan sosial.¹⁴ Hukum merupakan suatu produk sosial dan dianggap sebagai refleksi dari kesadaran masyarakat secara keseluruhan dan sekaligus dari kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.

Kesadaran hukum memiliki peran penting dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum. kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya.¹⁵ Untuk dapat mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat terhadap terdapat indikator-indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.¹⁶ Keempat indikator tersebut menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, tetapi jika dia berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

¹³ *Ibid.*, 59.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 69.

¹⁵ *Ibid.*, 159.

¹⁶ Otjo Salman dan Anthon F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (Bandung: Alumni, 2012), 52. Serta disebutkan dalam Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 159.

Koperasi Masjid Sabilillah merupakan pengelola wakaf uang sejak tahun 2003.¹⁷ Ia telah berbadan hukum dengan nomor 173/BH/KDK.13.32/1.2/V/99 dan berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 15 kec. Blimbing Kota Malang.¹⁸ Koperasi tersebut berdiri di dalam naungan Yayasan Masjid Sabilillah. Selain ia menghimpun dan mengelola wakaf uang, ia juga berfungsi sebagai koperasi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai pengembangan ekonomi para anggotanya.

Terdapat catatan yang digaris bawahi oleh penulis bahwa koperasi tersebut dalam pengelolaan wakaf uang tidak sepenuhnya sejalan dengan peraturan tentang wakaf uang yang berlaku di Indonesia. Karena itu penulis ingin mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum koperasi tersebut melalui indikator-indikator kesadaran hukum yang telah diuraikan sebelumnya.

Melihat peran kesadaran hukum untuk menentukan keefektifan peraturan tentang wakaf uang serta wakaf uang yang memiliki potensi besar. Maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang “Kesadaran Hukum Koperasi Masjid Sabilillah Dalam Pengelolaan Wakaf Uang.”

¹⁷ Wawancara dengan Sekretaris II Koperasi Masjid Sabilillah, bapak Heru Pratikno, pada tgl 9 januari 2019.

¹⁸ Foto copy Akta Pendirian Koperasi Masjid Sabilillah.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang?
2. Apa hambatan dan tantangan yang dihadapi Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang dalam mengelola wakaf uang?
3. Bagaimana tingkat kesadaran hukum Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang dalam pengelolaan wakaf uang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang.
- b. Mengetahui hambatan dan tantangan yang dihadapi Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang dalam mengelola wakaf uang.
- c. Mengetahui tingkat kesadaran hukum Koperasi Masjid Sabilillah dalam pengelolaan wakaf uang.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat mengambil beberapa manfaat antara lain:

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar strata satu di Universitas Muhammadiyah Malang.

- b. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis mengenai semua yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Penelitian ini sebagai bahan perbaikan/peningkatan bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan wakaf uang.
- d. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsyiyah.

D. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Hal tersebut bertujuan untuk memberi kejelasan bahwa judul yang diangkat penulis adalah baru dan belum pernah diteliti.

Pertama, oleh Sudirman Hasan dan Nanda Lailatul Arafah yang berjudul “Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” pada tahun 2016. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Penelitian saudara Sudirman Hasan membahas manajemen pengelolaannya, sedangkan yang diteliti penulis lebih fokus pada kesadaran hukum pengelolanya, yaitu pengurus Koperasi Masjid Sabilillah.

Kedua, oleh Hifna Wardatus Sholiha dengan judul “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi

Kasus di Koperasi Masjid Sabilillah)” pada tahun 2016.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki beberapa perbedaan antara lain dari segi tinjauannya. Penelitian saudara Hifna menggunakan tinjauan hukum islam islam, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan menggunakan hukum positif Indonesia. Lalu dari segi pembahasannya, yang pertama membahas pengelolaan wakaf uang sedangkan yang kedua membahas kesadaran hukum pengurus koperasi tersebut.

Ketiga, oleh Ali Maghfur dengan judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf” pada tahun 2008.²⁰ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu hanya pada sudut pembahasan terkait kesadaran hukum. Namun terdapat perbedaan dari objek pembahasannya, penelitian saudara Ali Maghfus fokus pada objek sertifikasi tanah wakaf, sedangkan objek penelitian penulis adalah pengelolaan wakaf uang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis sosiologis, artinya penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi tidak mengkaji/menggali mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Sistem

¹⁹ Hifna Wardatus Sholiha, “Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam: Studi Kasus di Koperasi Masjid Sabilillah” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang 2016).

²⁰ Ali Maghfur, “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Sertifikasi Tanah Wakaf” (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang 2008).

norma yang dimaksud adalah peraturan tentang wakaf uang yang berlaku di Indonesia dengan objek lapangan yaitu Koperasi Masjid Sabilillah. kedua hal tersebut diamati dengan konsep kesadaran hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis penelitian tersebut bertujuan menggambarkan situasi atau kejadian mengenai bidang tertentu secara sistematis. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Dalam hal ini penguraian kesadaran hukum koperasi secara sistematis.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sebagaimana berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini, yang didapat atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Objek penelitian yang dimaksud adalah Koperasi Masjid Sabilillah. Untuk mendapatkan data primer di objek penelitian dilakukan dengan cara wawancara terhadap para pengurus yang bekerja di dalamnya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap data primer. Data ini diperoleh melalui peraturan perundang-

undangan, buku-buku hukum yang datanya relevan dengan penyusunan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Penulis pengumpulan data melalui telaah buku-buku yang membahas tentang kesadaran hukum dan wakaf uang dalam hukum Islam. Selain itu penulis mengumpulkan data dari arsip pemerintah Indonesia yaitu perundang-undangan yang terkait wakaf uang. Kemudian penulis juga mengumpulkan data dari hasil skripsi maupun jurnal sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara dengan responden melalui tanya jawab untuk memperoleh keterangan mengenai penulisan ini. dalam hal ini tanya jawab dengan pengurus Koperasi Masjid Sabilillah.

Karena dalam struktur koperasi tersebut banyak pengurus yang menjabat, maka penulis mengambil sampel dari keseluruhan pengurus yang ada. Empat sampel yang akan digunakan antara lain Ketua I bapak Sulaiman, Sekretaris I bapak Heru Pratikno,

Bendahara I bapak Ahmad Farkhan, Bendahara II bapak M. Nugroho Edy Swasono.

Kemudian yang dibahas dalam dalam wawancara atau dialog tersebut tentang kesadaran hukum pengurus koperasi terkait pengelolaan wakaf uang. Dalam kesadaran hukum terpecah menjadi empat bagian diantaranya pengetahuan hukum, pemahaman huku, sikap hukum dan perilaku. Empat bagian tersebut menjadi sebuah tanya jawab antara penulis pengurus koperasi. Dengan demikian dapat mengambil kesimpulan seberapa tinggi kesadaran hukum pengurus di koperasi tersebut dilihat dari empat bagian yang diulas sebelumnya.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang mendalam tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini mengamati proses penerimaan wakaf oleh koperasi. lalu mengamati proses pengembangan wakaf seperti terjun ke lapangan melihat objek harta benda wakaf yang menjadi bentuk pengembangan wakaf uang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis studi kasus.²¹ Data yang terkumpul dianalisis dengan konsep kesadaran. Dengan begitu dapat diketahui setiap indikator tersebut

²¹ *Ibid.*, 229.

sehingga dapat disimpulkan tingkat kesadaran kesadaran Koperasi Masjid Sabilillah.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Selain itu menguraikan tentang penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua menguraikan tentang kajian teoritik yaitu kesadaran hukum, indikator kesadaran hukum dll.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga ini menguraikan pembahasan tentang penyelesaian masalah, proses analisis penelitian, sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan.

BAB IV PENUTUP

Bab empat berisikan kesimpulan dari hasil kajian pada bab-bab sebelumnya.